

Adi Fahrudin  
Mohd Dahlan HA Malek  
Suryanto  
Nurhidayah

# INOVASI BISNIS DAN SOSIAL DI ERA DISRUPTIF



Revolusi industri 4.0 dengan kemajuan teknologi internet dan digital selain memberi berbagai dampak disruptif namun juga memberi peluang untuk melakukan kajian mengenai perubahan tingkah laku manusia dari berbagai perspektif ilmu dan profesi. Dewasa ini masyarakat kita dihadapkan tidak kurang pada tiga isu utama yang saling berkaitan yaitu isu ekonomi dan bisnis, sosial dan psikologis. Isu ekonomi dan bisnis yang paling menonjol adalah perubahan pola investasi ekonomi, perubahan kepemimpinan bisnis dan *technopreneurship*, perubahan model inovasi bisnis untuk menghadapi persaingan di era revolusi industri. Sementara isu psikososial pula muncul dalam banyak wajah (*multi faces*) dari perubahan pilihan makanan, penjangkauan layanan kesehatan bagi kaum marginal, keterlantaran lanjut usia, masalah perkawinan dan perceraian, disonansi kognitif pada pengguna *medical marijuana* sehingga perubahan strategi intervensi seperti terapi perilaku kognitif. Dalam menghadapi era disruptif ini maka diperlukan strategi dan inovasi dalam bidang bisnis dan sosial yang tepat.



Adi Fahrudin  
Mohd Dahlan HA Malek  
Suryanto  
Nurhidayah

# INOVASI BISNIS DAN SOSIAL DI ERA DISRUPTIF

***totalmedia***

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

**Adi Fahrudin, Mohd Dahlan HA Malek, Suryanto, Nurhidayah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memproduksi/memfotocopi seluruh atau sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dianggap melanggar Undang-undang Hak Cipta Republik Indonesia.

Judul Buku : Inovasi Bisnis dan Sosial di Era Disruptif  
Editor : Adi Fahrudin, Mohd Dahlan HA Malek, Suryanto, Nurhidayah  
Penulis : Abu Hurairah, Adi Fahrudin, Fahmi Ilman Fahrudin, Fikran Aranda Fahrudin, Heri Erlangga, Husmiati, Ida Hindarsah, Ida Safinas Mohd Kamil, Laila Meiliyandrie Indah Wardani, Meiti Subardhini, Mohd Dahlan HA Malek, Suryanto, Tri Narsiano, Yessilia Osira & Bayu Risdiyanto.

Layout/Setting : Suhartono  
Design Cover : Muhammad Haikal  
Penerbit : Total Media  
ISBN : 978-602-1271-46-9

Diterbitkan oleh :

**Total Media Yogyakarta**  
**Januari 2020**

ANGGOTA IKAPI DIY

## KATA PENGANTAR

Buku ini diterbitkan berdasarkan gagasan dan pemikiran yang disampaikan para penulisnya dalam pertemuan ilmiah *3<sup>rd</sup> International Academia Roundtable Forum (IARTF)* yang ketiga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 9 November 2019. *Roundtable Forum* diisi dengan workshop dan seminar dari para academia dan mahasiswa Pascasarjana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia diantaranya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Bengkulu, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pasundan, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Mercu Buana Jakarta, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Malaysia Serawak. Tema besar yang dibahas adalah persoalan sosial di era disrupsi. Sebuah tema yang besar yang bisa didekati dari berbagai perspektif ilmu dan profesi masing-masing peserta. Banyak penyaji makalah dalam acara *3<sup>rd</sup> Roundtable Forum* namun hanya sedikit yang memilih memublikasikan tulisan mereka dalam buku ini.

Semua sedia maklum bahwa era disrupsi terjadi ketika suatu inovasi baru masuk ke pasar dan menciptakan efek disrupsi (kegoncangan bahkan kerusakan) yang cukup kuat sehingga mengubah struktur sosio-ekonomi yang sebelumnya dan berpengaruh kepada dimensi psikososial kehidupan manusia. Fenomena efek disrupsi dapat kita temukan di berbagai Negara termasuk di nusantara. Contohnya, Anda dapat menemukan adanya konflik antara sistem sosial tradisional dengan modern. Era disrupsi ini tidak dapat disepelekan karena bisa saja menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Berbagai persoalan sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain sebagainya semakin nyata dan memberi dampak yang sangat besar pada kehidupan individu, keluarga, kelompok, masyarakat, bangsa dan bernegara.

Oleh sebab itu perlu berbagai strategi untuk mengatasinya dari berbagai pendekatan dan perspektif.

Buku ini tentu belum dapat menjawab semua persoalan di atas. Namun gagasan yang dikemukakan oleh para penulis dalam buku ini setidaknya menjawab keterbatasan pemikiran dan penulisan mengenai isu tersebut terutama bahan bacaan yang menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Malaysia. Selaku editor buku ini kami hanya mengkompilasi dan melakukan editing tanpa merubah, menambah atau mengurangi tulisan. Hal ini berarti tanggungjawab keaslian, kualitas tulisan dan ketepatan data menjadi tanggungjawab penulis masing-masing Bab dalam buku ini. Semoga buku ini memberi manfaat kepada pembaca yang memerlukan rujukan sebagai bacaan atau rujukan untuk penulisan karya ilmiah.

Yogyakarta, 9 November 2019

Tim Editor

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Dartar Isi .....	v
Bab 1 Inovasi Bisnis dan Sosial di Era Disruptif <i>Adi Fahrudin, Mohd Dahlan Ha Malek, Suryanto &amp; Nurhidayah</i> .....	1
Bab 2 Faktor Lingkungan Dan Investasi Di Kota Surakarta <i>Dr. Suryanto</i> .....	11
Bab 3 Kepemimpinan Bisnis Dan Spirit <i>Technopreneurship</i> <i>Dr. Heri Erlangga</i> .....	31
Bab 4 Pergeseran Model Bisnis dan Desruktif Inovasi UMKM Di Indonesia <i>Dr. Ida Hindarsah</i> .....	47
Bab 5 Aksesibilitas Masyarakat Miskin Dalam Pelayanan Kesehatan <i>Dr. Abu Huraerah</i> .....	59
Bab 6 Konsep Dan Faktor Penentu Pilihan Makanan <i>Adi Fahrudin, PhD, Fahmi Ilman Fahrudin, S.Tp., MoFT, Fikran Aranda Fahrudin, Husmiati Yusuf, PhD</i> .....	75
Bab 7 <i>Home Care</i> Bagi Lanjut Usia Miskin <i>Yessilia Osira, S.Sos., MP &amp; Bayu Risdiyanto, MPS.Sp</i> .....	91
Bab 8 Strategi Menangani Masalah Perceraian Di Malaysia <i>Ida Shafinaz Mohd Kamil, LLM &amp; Mohd Dahlan Abdul Malek, PhD</i> .....	107
Bab 9 Terapi Perilaku Kognitif: Konsep Dan Implementasinya <i>Meiti Subardhini, PhD</i> .....	125
Bab 10 Disonansi Kognitif Individu Pengguna Medical Marijuana <i>Laila Meiliyandrie Indah Wardani, PhD &amp; TriNarsiano, S.Psi</i> .....	135
Biodata Penulis .....	160

## **BAB 2**

# **FAKTOR LINGKUNGAN DAN INVESTASI DI KOTA SURAKARTA**

**Dr. Suryanto**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sebelas Maret, Surakarta*

### **Pendahuluan**

Secara rata-rata perkembangan ekonomi Kota Surakarta dinilai lebih baik dibanding dengan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan indeks Gini Kota Surakarta menunjukkan nilai yang lebih baik. Prestasi kerja pemerintah Kota Surakarta tidak terlepas dari persepsi publik bahwa stimulus fiskal melalui kebijakan pengelolaan belanja pemerintah dinilai efektif, efisien, akuntabel dan berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Sementara dari sisi mikro, iklim investasi di Kota Surakarta dikategorikan bagus (didominasi aspek kekukatan peluang). Kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam memberikan pelayanan kepada investor di Kota Surakarta mendapatkan penilaian bagus terutama kinerja dalam hal persyaratan, prosedur, kejelasan, ketepatan waktu, serta pelayanan. Secara lebih mendalam beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan investor swasta untuk mempertahankan dan meningkatkan investasinya di Kota Surakarta didasarkan pada insentif kemudahan dalam hal perijinan dan perpajakan. Insentif tersebut dalam bentuk kemudahan persyaratan perijinan dan pengurangan pajak, *grace periode* pembayaran pajak, dan pembayaran pajak secara bertahap. Hal hal tersebut diyakini mampu mendorong peningkatan kinerja investasi di Kota Surakarta dan sejalan dengan peningkatan kinerja perusahaan yang berinvestasi di Kota



Bengawan. Penentuan jenis investasi tersebut bertujuan untuk menyelaraskan dengan kebutuhan pelaku usaha (business) dengan didasarkan pada skala usaha atau ukuran perusahaan (*firm size*). Secara ilmiah beberapa kajian yang menjelaskan hubungan antara investasi dengan kinerja perusahaan terutama yang didasarkan pada skala usaha atau ukuran perusahaan (*firm size*). Di Indonesia, kajian yang dilakukan oleh Iryayanti dan Aziz (2012) dengan fokus kajian pada faktor kendala (*barrier*) untuk pengembangan investasi khususnya investasi yang dilakukan pada usaha skala Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyimpulkan bahwa faktor keterbatasan kemampuan bersaing, akses keuangan, perubahan harga energi, keterbatasan teknologi, inefisiensi biaya produksi, terbatasnya ketrampilan managerial, keterbatasan dalam penjualan produk dan ketersediaan bahan baku (mentah). Rekomendasi atas temuan Iryanti dan Aziz (2012) kepada regulator khususnya pemerintah adalah bagaimana pemerintah fokus untuk mengeliminasi berbagai faktor kendala tersebut melalui berbagai program misalnya program pengembangan UMKM, kebijakan program pembiayaan UMKM yang baik, peningkatan standar keamanan yang mendukung pengembangan UMKM, melakukan evaluasi kinerja UMKM secara berkelanjutan, dan komitmen pemerintah untuk mengurangi moral hazard dan program lainnya yang bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Sedangkan bagi pelaku usaha yang sudah berorientasi untuk mengarap pasar internasional, Vithessonhi (2016) menemukan bahwa peningkatan investasi *capital* berdampak positif signifikan terhadap peningkatan penjualan produk (barang dan jasa) ke luar negeri, tetapi tidak berpengaruh terhadap derajat internasionalisasi perusahaan. Pandangan Vithessonhi (2016) tersebut menunjukkan bahwa investasi modal memberikan ruang bagi investor untuk mengenalkan produknya di pasar internasional lebih masif, meskipun tidak berpengaruh pada peningkatan derajat internasionalisasi perusahaan tersebut. Kondisi ini diduga karena masih lemahnya institusional

perusahaan di dalam negeri yang terdorong untuk mengikuti program internasionalisasi perusahaan. Selain itu dukungan pemerintah melalui program hibah berdampak positif terhadap peningkatan investasi dan peningkatan kinerja perusahaan (Carbone&Moatte, 2016). Program bantuan hibah pemerintah merupakan sinyal positif pemerintah yang percaya kepada sektor swasta, sehingga memberikan keyakinan kepada sektor keuangan untuk mempermudah akses keuangan ke perusahaan.

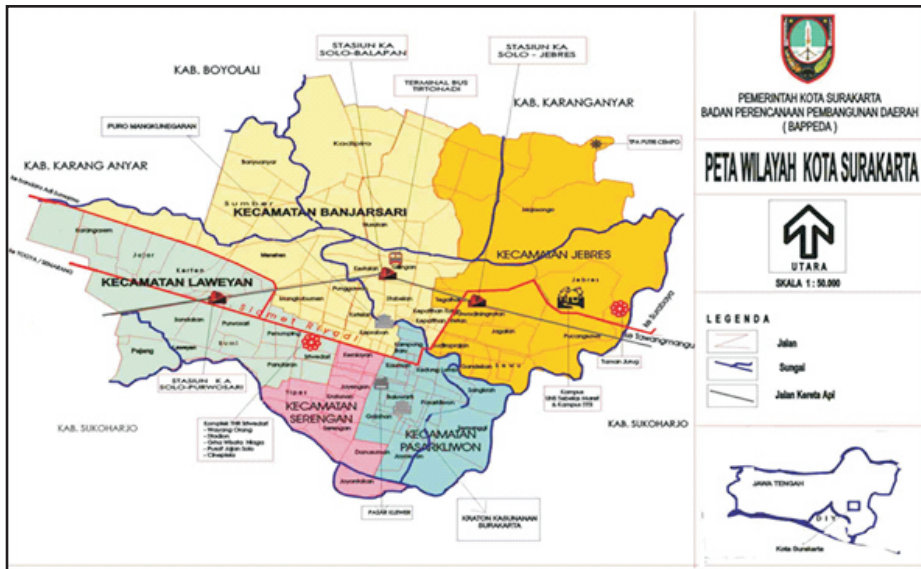
Sinyal positif pemerintah yang diikuti dengan peningkatan kemudahan akses keuangan perusahaan ke sektor keuangan dengan kepastian jenis investasi yang outputnya memberikan keuntungan pasti kepada perusahaan lebih menarik (*attractiveness*) bagi perusahaan (Perez dan Orive, 2016). Dengan kata lain perusahaan akan lebih *attractiveness* jika akses modal lebih longgar, jenis permodalan sangat likuid dan investasi yang dilakukan memberikan output dengan tingkat kepastian keuntungannya tinggi. Sehingga kinerja perusahaan akan semakin meningkat signifikan. Selanjutnya faktor tersebut kemampuan efisiensi institusional perusahaan sangat menentukan kinerja perusahaan (Bostian et al, 2016). Efisiensi institusional yang diukur dengan kemampuan dalam meningkatkan produktivitas dan penggunaan energi yang efisien serta dukungan lingkungan secara keseluruhan mampu meningkatkan skala usaha perusahaan (*firm size*). Determinan lain yang menentukan peningkatan kinerja perusahaan (skala usaha perusahaan) adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan inovasi. Menurut Dobni, (2010), Gunday, et al. (2011), dan Yildiz et al. (2014) menyimpulkan bahwa kinerja inovasi perusahaan ditentukan oleh investasi teknologi perusahaan yang berkelanjutan, kecukupan kepemilikan asset dan pengalaman (usia) perusahaan. Tanpa ketiga faktor tersebut maka kemampuan inovasi perusahaan akan sangat terbatas. Di sisi lain untuk memberikan keyakinan kepada investor untuk lebih *attractiveness* berinvestasi maka diperlukan daya dukung kebijakan makroekonomi yang pasti.

Hasil penelitian Bappenas (2017) menunjukkan bahwa indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi berdampak pada peningkatan tekanan ketidakpastian investasi perusahaan dan berdampak negatif signifikan terhadap investasi perusahaan dalam jangka panjang. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi terdiri dari pemberitaan ketidakpastian kebijakan, proyeksi inflasi antar kuartal, perundang-undangan perpajakan yang kurang responsive (*out of date*), dan perkiraan belanja pemerintah daerah antar kuartal. *Attractiveness* investor diperlukan meningkatkan iklim investasi, melalui penurunan indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi dengan meningkatkan pemberitaan kepastian kebijakan, proyeksi inflasi antar kuartal yang presisi dan kredibel sebagai dasar untuk penghitungan biaya aktivitas perusahaan, perundang-undangan perpajakan yang *up to date* (sesuai dengan kebutuhan dunia usaha) dan akurasi perkiraan belanja pemerintah daerah antar kuartal. Respon dunia usaha (*business*) akan semakin tertarik luar biasa (*attractiveness of extraordinary*) jika diikuti dengan dukungan *political will* pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, terutama pada sektor ekonomi yang tingkat sensitivitas profitabilitasnya tinggi yang berdampak signifikan pada sensitivitas investasi perusahaan (Staglianò dan Andrieu, 2016). Berdasarkan berbagai determinan tersebut, kajian ini ingin membuktikan pengaruh peningkatan kinerja investasi, insentif dan kemudahan yang didasarkan pada skala usaha perusahaan (*firm size*) di Kota Surakarta, khususnya untuk pengembangan ekonomi di Wilayah Solo Utara dan Selatan. Prioritas pengembangan ekonomi di kedua wilayah tersebut didasarkan pada beberapa asumsi antara lain: (a). Wilayah Solo utara dianggap tingkat pengembangan ekonominya relatif rendah jika dibandingkan wilayah Solo lainnya; (b). Bahwa pembangunan ekonomi mensyaratkan pemerataan yang diharapkan berdampak pada peningkatan pemerataan pendapatan; (c). Dalam RPJMD 2016-2021 Kota Surakarta wilayah Solo utara merupakan bagian prioritas untuk dikembangkan menjadi kluster ekonomi yang

unggul, yang bersama – sama dengan kluster di wilayah lain untuk menopang perekonomian Kota Surakarta.

### Gambaran Umum

Gambar 1 menunjukkan peta Kota Surakarta yang memiliki lima kecamatan yaitu Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres (Solo Utara), Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon (Solo non Utara).



Sumber: Bapeda Kota Surakarta

Gambar 1. Peta Kota Surakarta

Kuesioner didistribusikan kepada 70 perusahaan dengan berbagai jenis bidang usaha tersebar di Surakarta bagian Barat, Utara, Timur, dan Selatan. Jumlah kuesioner tidak memperhatikan besar kontribusi sektoral, tetapi didasarkan kepada jenis usaha yang banyak dilakukan oleh penduduk di Solo Utara. Tabel 1 menyajikan bidang usaha perusahaan yang menjadi sampel studi.

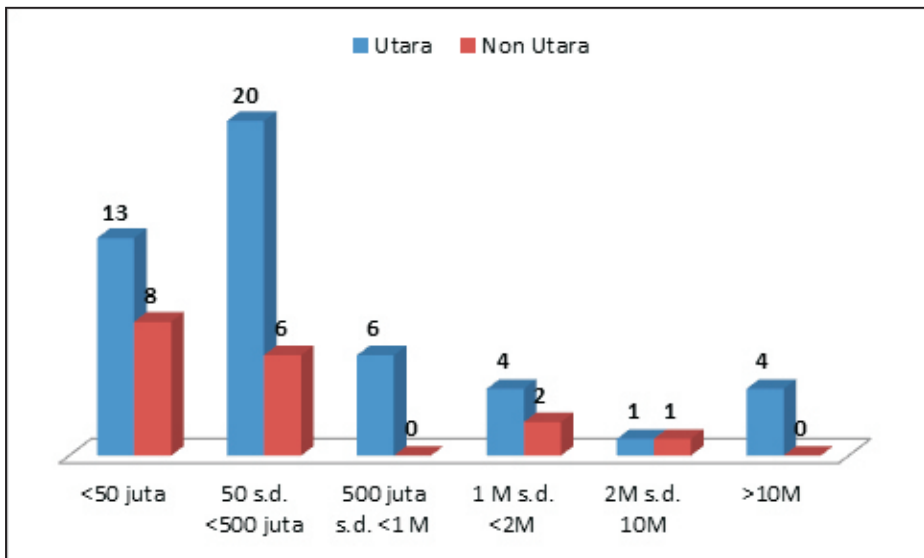
Tabel 1.  
Jenis/Bidang Usaha Perusahaan

<b>Bidang Usaha</b>	<b>Utara</b>	<b>Non Utara</b>	<b>Total</b>	<b>Distribusi</b>
Pertanian/Peternakan	3	1	4	0.06
Makanan/minuman	3	1	4	0.06
Bengkel/reparasi	3	1	4	0.06
Industri peralatan rumah tangga	0	0	0	0.00
Lainnya	13	6	19	0.27
Elektronika	4	0	4	0.06
Konveksi	1	1	2	0.03
Perhotelan	5	2	7	0.10
Keuangan	1	1	2	0.03
Furniture/Kayu	3	2	5	0.07
Barang dari kulit	0	0	0	0.00
Kerajinan	0	0	0	0.00
Industri kimia	0	1	1	0.01
Teknologi informasi/komunikasi	1	0	1	0.01
Perdagangan	10	2	12	0.17
Farmasi	3	1	4	0.06
Industri logam	0	1	1	0.01
Transportasi	0	0	0	0.00
Jumlah	50	20	70	1.00

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 1, dari 70 perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1 diketahui terdapat 12 perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan (17 persen), 7 perusahaan perhotelan (10 persen), 5 perusahaan furniture (7 persen), dan ada 19 perusahaan yang bergerak di bidang lain-lain (29 persen). Berdasarkan lokasinya, terdapat 50 perusahaan yang berada di Surakarta bagian utara dan 20 perusahaan berasal dari Surakarta non utara (barat, timur, dan selatan). Komposisi perusahaan yang (rencana) berada di wilayah utara dan selatan ini ditunjukkan agar

diperoleh informasi tentang kondisi wilayah utara Surakarta baik dari sudut pandang perusahaan yang berada di wilayah utara sendiri maupun wilayah lain. Dari aspek nilai investasinya, sebanyak 28 dari 70 perusahaan atau 40 persen memiliki nilai investasi 50 s.d. < 500 juta, disusul kemudian nilai investasi yang <50 juta yaitu sebanyak 22 perusahaan atau 32,31 persen. Perusahaan yang memiliki nilai investasi di atas 1 milyar adalah sebanyak 12 perusahaan. Dari 12 perusahaan tersebut, terdapat 6 perusahaan yang memiliki nilai investasi 1 s.d. <2M dengan rincian 4 di wilayah utara dan 2 di wilayah non utara. Selanjutnya terdapat 2 perusahaan dengan nilai investasi antara 2 s.d. 10M dan satu di antaranya berada di wilayah utara, serta terdapat 4 perusahaan dengan nilai investasi di atas 10 milyar dan semuanya berlokasi di wilayah utara.

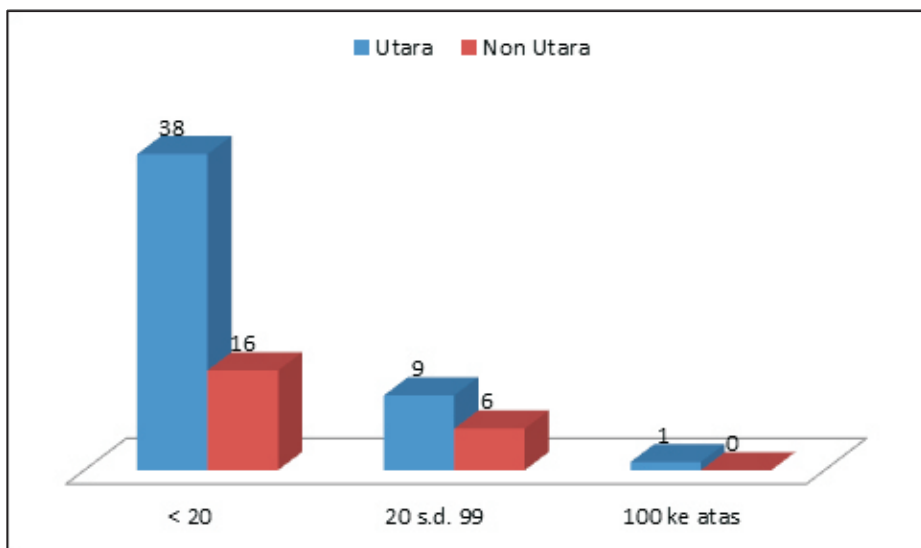


Gambar 2.

### Nilai Investasi Perusahaan

Klasifikasi jenis usaha berdasarkan jumlah karyawan, sebagian besar perusahaan tergolong kecil. Perusahaan yang

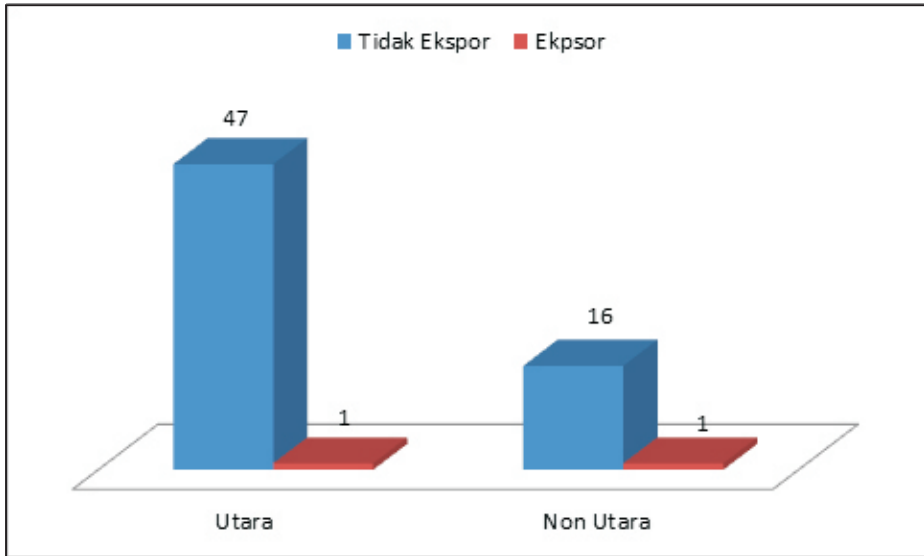
memiliki karyawan di bawah 20 orang yaitu 54 perusahaan atau 76,92 persen dan terdapat 15 perusahaan atau 21,54 persen perusahaan dengan jumlah karyawan sebanyak 20 s.d. 99 orang dan sisanya satu perusahaan dengan jumlah karyawan di atas 100 orang. Dari 50 perusahaan yang memiliki jumlah karyawan di bawah 20 orang tersebut, 38 di antaranya adalah perusahaan yang berlokasi di wilayah utara sedangkan dari 14 perusahaan dengan jumlah karyawan 20 s.d. 99 orang, terdapat 9 perusahaan yang berlokasi di wilayah utara. Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan masih memiliki skala usaha yang kecil hingga menengah. Hal ini dapat dilihat dari dari investasi dan jumlah karyawan di atas.



Gambar 3.  
Jumlah Karyawan Perusahaan

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masih sedikitnya perusahaan yang berorientasi ekspor, yaitu hanya ada 2 perusahaan, satu dari utara dan satu dari non utara. Berikut ini disajikan Gambar 4.4 yang menyajikan perusahaan yang

beorientasi ekspor.

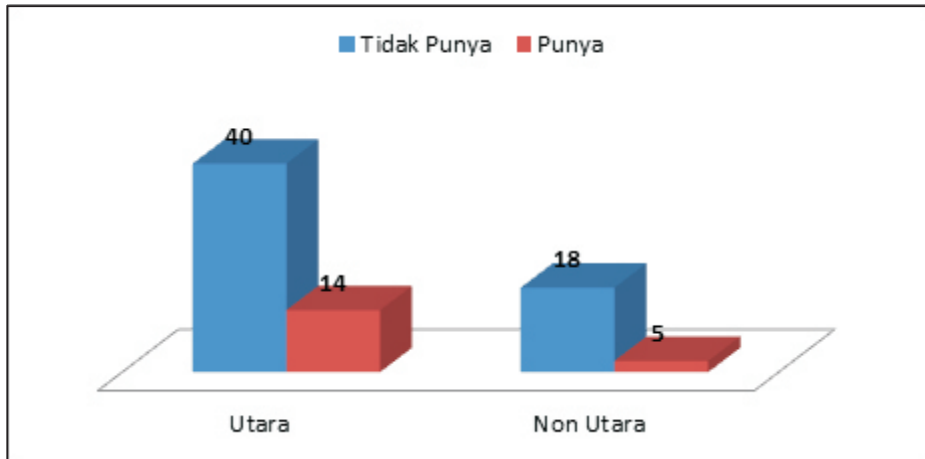


Gambar 4.

#### Jumlah Perusahaan Orientasi Ekspor

Perusahaan yang memiliki orientasi ekspor tersebut bergerak di bidang furniture dan berlokasi di wilayah utara, serta perusahaan konveksi yang berasal dari wilayah timur. Apabila ditinjau dari kepemilikan cabang perusahaan dapat diperhatikan pada Gambar 4.5. Dari sisi kepemilikan cabang, masih sedikit perusahaan yang memiliki cabang, yaitu terdapat 13 dari 65 dan sebagian besar tidak memiliki cabang.





Gambar 5  
Status Kepemilikan Cabang

Kedekatan sumber bahan baku merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh perusahaan dalam berinvestasi. Sebagian besar perusahaan menggunakan bahan baku dari Surakarta. Dari 70 perusahaan yang disurvei terdapat 45 perusahaan menyatakan menggunakan bahan baku dari Surakarta. Namun masih ada 8 perusahaan menyatakan menggunakan bahan baku bukan dari Surakarta.

Tabel 2.  
Sumber Bahan Baku

Sumber Bahan Baku	Utara	Non Utara	Total
Dari luar Surakarta	7	1	8
Sebagian besar dari Surakarta	32	13	45
Sebagian kecil dari Surakarta	13	2	15
Dari dalam Surakarta	1	1	2

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan sumber tenaga kerja dapat diperhatikan pada Tabel 4.3. Distribusi perusahaan yang disurvei dari kawasan utara 48 perusahaan dan selain utara sebanyak 17 perusahaan. Dari 65 perusahaan, terdapat 38 perusahaan yang sebagian besar berasal dari Surakarta dan 23 perusahaan yang menggunakan tenaga kerjanya semua dari dalam Surakarta. Hanya 4 perusahaan yang menggunakan tenaga kerjanya dari luar Surakarta yaitu perusahaan furniture, kimia, dan elektronika.

Tabel 3.  
Sumber Tenaga Kerja

<b>Sumber Tenaga Kerja</b>	Utara	Selain Utara	Total
Dari luar Surakarta	6	3	5
Sebagian besar dari Surakarta	31	11	42
Dari dalam Surakarta	18	5	23
Sebagian kecil dari Surakarta	0	0	0

Sumber: data primer diolah

### 1. Prioritas Jenis Insentif

Bentuk insentif yang diharapkan adalah berupa bantuan modal atau dana stimulan, kemudian disusul oleh bantuan dalam hal masalah perijinan, dan yang ketiga adalah masalah pengurusan/penyediaan lahan. Bila dikelompokkan berdasarkan lokasi usahanya, terlihat perbedaan skala prioritas antara perusahaan yang berlokasi di wilayah utara dan selain utara. Perusahaan di wilayah utara menempatkan bantuan modal/ dana stimulan sebagai prioritas pertama sementara perusahaan di wilayah selain utara menempatkan masalah perijinan sebagai prioritas pertama. Untuk prioritas kedua, wilayah utara lebih memprioritaskan masalah perijinan sedangkan wilayah selain utara adalah masalah bantuan modal/dana stimulan. Untuk

prioritas ketiga baik wilayah utara dan wilayah selatan memiliki prioritas yang sama yaitu masalah pengurusan/ penyediaan lahan.

Tabel 4.  
Prioritas Jenis Insentif

Jenis insentif/kemudahan/bantuan	Utara		Non Utara	
	Nilai	Urutan Prioritas	Nilai	Urutan Prioritas
Perijinan	175	2	51	1
Pengurusan/penyediaan lahan	184	3	58	3
Bantuan masalah perpajakan	175	2	69	4
Bantuan masalah retribusi	217	5	88	6
Bantuan modal/dana stimulan	149	1	54	2
Penyediaan sarana dan prasarana	194	4	70	5
Penyediaan bantuan teknis	250	6	89	7

Sumber: data primer diolah

Secara lebih detil, dalam hal perijinan bentuk bantuan yang diprioritaskan antara perusahaan wilayah utara dan selain utara menunjukkan perbedaan. Perusahaan wilayah utara mengharapkan bantuan proses perijinan yang lebih dipercepat, disusul kemudian bantuan dalam hal persyaratan perijinan yang lebih dipermudah, dan terakhir adalah masalah prosedur perijinan. Sementara untuk perusahaan selain utara, prioritas pertama ada dua macam yaitu persyaratan perijinan yang lebih mudah dan prosedur perijinan yang diperjelas.

Tabel 5  
Prioritas Perijinan

Perijinan	Utara		Non Utara	
	Nilai	Urutan Prioritas	Nilai	Urutan Prioritas
Proses perijinan lebih dipercepat	88	1	38	2
Persyaratan perijinan lebih dipermudah	89	2	32	1
Prosedur perijinan diperjelas	111	3	32	1

Sumber: data primer diolah

Prioritas utama dalam pengurusan lahan menurut persepsi perusahaan yang berada di wilayah utara adalah persyaratan perizinan, sedangkan perusahaan yang di wilayah selain utara adalah prosedurnya.

Tabel 6.  
Prioritas Pengurusan Lahan

Pengurusan/Penyediaan Lahan	Utara		Non Utara	
	Nilai	Urutan Prioritas	Nilai	Urutan Prioritas
Proses perijinan lebih dipercepat	89	2	36	3
Persyaratan perijinan lebih dipermudah	83	1	34	2
Prosedur perijinan diperjelas	116	3	32	1

Sumber: data primer diolah

Untuk masalah perpajakan, baik perusahaan yang berlokasi di wilayah utara maupun selatan memiliki prioritas yang sama, prioritas pertama yaitu ada **pengurangan pajak**, meski harus dibayarkan tepat waktu, dan prioritas kedua tidak ada pengurangan namun pajak bisa diangsur hingga jangka waktu tertentu. Mekanisme pembayaran pajak yang mudah menjadi prioritas terakhir bagi semua perusahaan. Pengurangan pajak ini memang menempati prioritas paling tinggi dan dapat dilaksanakan oleh pemda, meski harus mempertimbangkan beberapa hal seperti: (1) besarnya pengurangan, (2) kriteria perusahaan yang mendapatkan pengurangan, (3) prosedur pengurangan pajak, dan (4) dampak pengurangan pajak terhadap kinerja PAD. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam berkaitan dengan strategi dan kebijakan ini. Kondisi ini tidak berbeda dengan insentif atau kemudahan retribusi, responden memiliki pengurangan retribusi sebagai prioritas dibandingkan insentif atau kemudahan dalam hal *grace period* pembayaran retribusi maupun mekanisme pembayaran retribusi.

Tabel 7  
 Prioritas Masalah Perpajakan

Jenis Bantuan Perpajakan	Utara		Non Utara	
	Nilai	Urutan Prioritas	Nilai	Urutan Prioritas
Ada pengurangan pajak, namun harus dibayarkan tepat waktu	80	1	34	1
Tidak ada pengurangan pajak, tapi bisa diangsur hingga waktutertentu	110	2	37	2
Tidak ada pengurangan pajak, tapi ada <i>grace period</i> /masa tenggang pembayaran pajak	137	3	46	3
Tidak ada pengurangan pajak, tapi ada kemudahan mekanisme pembayaran pajak	153	4	53	4

Sumber: data primer diolah

Sementara itu dalam hal bantuan modal/dana stimulan, prioritas yang diharapkan pengusaha atau investor wilayah utara dan wilayah selatan memiliki pola yang sama. Seluruhnya menempatkan **kemudahan akses modal** sebagai prioritas pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa pengusaha atau investor mengharapkan kerjasama dengan para pemilik modal (investor atau lembaga keuangan) yang memudahkan mereka dalam akses modal untuk pengembangan usaha. Hal ini memang bukan hal yang mudah karena menyangkut banyak hal, seperti risiko bisnis, prospek usaha, jaminan, dan lain-lain.

Tabel 8  
Prioritas Masalah Modal/Dana Stimulan

Jenis Bantuan Modal/Dana Stimulan	Utara		Non Utara	
	Nilai	Urutan Prioritas	Nilai	Urutan Prioritas
Ada kemudahan akses modal	79	1	28	1
Ada insentif dana bagi pelaku usaha	94	2	35	2
Ada kemudahan mekanisme akses modal & dana stimulan	115	3	39	3

Sumber: data primer diolah

Untuk masalah bantuan teknis, terdapat perbedaan prioritas antara pengusaha yang berlokasi di wilayah utara dan selain utara. Pengusaha wilayah utara memprioritaskan bantuan teknis produksi sementara yang selain utara memprioritaskan masalah peningkatan kualitas SDM. Perbedaan prioritas ini memang terkait dengan jenis usahanya, namun secara umum pola pembinaan teknik produksi dan pengembangan kualitas SDM merupakan program yang perlu diprioritaskan.

Tabel 9  
Prioritas Masalah Bantuan Teknis

Jenis Bantuan Teknis	Utara		Non Utara	
	Nilai	Urutan Prioritas	Nilai	Urutan Prioritas
Bantuan teknis peningkatan produksi	71	1	40	3
Bantuan teknis peningkatan SDM	94	2	29	1
Bantuan teknis peningkatan pemasaran	122	3	36	2

Sumber: data primer diolah

Pendapat responden mengenai infrastruktur di wilayah utara, kondisi jalan utama berada prioritas satu yaitu 3,24 dan di urutan kedua adalah kondisi akses jalan utama. Kondisi jalan menggambarkan kondisi secara fisik, sedangkan akses menggambarkan kondisi menuju lokasi atau wilayah. Skor tertinggi ketiga adalah masalah jaringan listrik dan yang terendah adalah jaringan air bersih. Jaringan air bersih memperoleh skor 2,93 atau di bawah rata-rata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena air bersih menjadi bagian vital dalam pengembangan kawasan sebagaimana halnya listrik.

Tabel 10.  
Pendapat Atas Infrastruktur Kawasan Utara

Kondisi	Sangat Buruk	Buruk	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	Jumlah	Skor	Rata-rata Skor
Jaringan listrik	0	14	24	20	0	58	180	3.1034
Jaringan air bersih	4	14	22	18	0	58	170	2.9310
Kondisi jalan utama	0	9	26	23	0	58	188	3.2414
Akses jalan utama	0	12	24	22	0	58	184	3.1724

Sumber: data primer diolah

Di samping masalah dasar seperti listrik, air, jalan, dan sebagainya terdapat pula beberapa faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam memilih lokasi investasi. Terdapat 8 item yang ditanyakan kepada investor tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih lokasi investasi, yaitu: (1) kondisi jalan beraspal/tidak, (2) jalan lebar/sempit, (3) keramaian, (4) kedekatan dengan pemukiman, (5) kedekatan dengan pusat pemerintahan, (6) kedekatan dengan pusat perdagangan/bisnis, (7) keberadaan penerangan jalan, dan (8) jauh tidaknya dari persawahan. Dari faktor-faktor di atas, skor tertinggi adalah faktor adanya jalan penerangan umum yaitu 3,31. Hal ini mengindikasikan bahwa penerangan jalan umum menuju lokasi atau kawasan usaha merupakan hal yang menjadi pertimbangan utama. Skor tertinggi kedua yaitu frekuensi

penduduk dan kendaraan yang melewati lokasi tersebut dengan skor 3,27. Keramaian akan memudahkan terciptanya pasar baru bagi perusahaan. Skor tertinggi kesatu dan kedua tersebut mengindikasikan bahwa aspek jalan dan penerangan menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan. Hal ini diperkuat dengan skor tertinggi ketiga yaitu jalan sudah beraspal, dengan skor 3,12. Skor terkecil adalah jauh tidaknya lokasi usaha dari area persawahan. Hal ini berarti, pengusaha tidak terlalu mempermasalahkan lokasi atau kawasan usaha yang dekat atau jauh dari sawah. Mereka lebih memperhatikan kondisi jalan dan penerangan, serta tingkat keramaian yang akan terjadi.

Tabel 11.  
Faktor yang Dipertimbangkan dalam Pemilihan  
Lokasi Investasi

Kondisi Lokasi Investasi	Tidak penting	Agak Penting	Penting	Sangat Penting	Jumlah	Skor	Rata-rata Skor
Jalan sudah beraspal	1	2	51	12	66	206	3.121
Jalan lebar	1	8	44	13	66	201	3.045
Lokasi usaha ramai/dilewati penduduk atau kendaraan umum	1	4	37	24	66	216	3.273
Dekat dengan pemukiman penduduk	4	10	35	17	66	197	2.985
Dekat dengan pusat kota/pemerintahan	4	8	35	19	66	201	3.045
Dekat dengan hotel/kawasan perbelanjaan/pasar	3	10	39	15	67	200	2.985
Ada penerangan jalan umum di jalan utama	0	0	46	21	67	222	3.313
Jauh dari persawahan	18	5	33	9	65	163	2.508

Sumber: data primer diolah



## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian dan kajian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kajian insentif dan kemudahan usaha didasarkan analisis perbandingan antar insentif atau kemudahan dengan menggunakan pendekatan AHP, terlihat 3 prioritas yang dinilai tinggi oleh pengusaha atau investor yaitu: (1) bantuan modal/dana stimulan, (2) bantuan masalah perpajakan, serta (3) bantuan sarana/prasarana. Sedangkan yang dinilai rendah adalah masalah perijinan dan masalah pengurusan lahan. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua hal tersebut bukan merupakan masalah besar bagi pengusaha atau investor, dengan kata lain tidak ditemukan permasalahan dalam kedua hal tersebut.
2. Prasyarat yang menjadi ekspektasi dasar investor untuk berinvestasi di Wilayah Solo Utara:
  - 1) Aspek infrastruktur dasar di Solo bagian utara sudah baik, namun secara relatif masih kalah dibanding Solo selain utara ditinjau dari beberapa aspek seperti akses jalan, kondisi jalan utama, penerangan umum, jaringan air bersih, dan listrik.
  - 2) Aspek sistem dan prosedur investasi, perusahaan yang berada di Solo utara menginginkan dipermudah persyaratan investasi, prosedur investasi, kejelasan prosedur/persyaratan, ketepatan waktu proses perizinan, dan pelayanan perizinan.
  - 3) Aspek jenis insentif, perusahaan di wilayah utara menempatkan bantuan modal/dana stimulan, masalah perijinan, dan masalah pengurusan/penyediaan lahan.

## Daftar Pustaka

- Andrieu, Guillaume & Staglianò, Raffaele, 2016. "The entrepreneur's choice of a venture capital firm: Empirical evidence from two VC fund portfolios," *Finance Research Letters*, Elsevier, vol. 17(C), pages 141-145.
- Bappenas (2017). *Tantangan Menghadap Risiko Ekonomi Global. Laporan Outlook Kerjasama Perdagangan Uni Eropa - Indonesia TCF*
- Bosmian, Moriah B. Fare, Rolf. Grosskopf, Shawna, and Lundgren, Tommy. Investment and firm performance: A network approach. *Energy Economics*. DOI: [10.1016/j.eneco.2016.05.013](https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.05.013)
- Carbone, Valentina and Valerie Moatti. 2016. *The Impact of Internal and External Collaboration on the Performance of Supply Chain Risk Management*. Academy of Management Annual Meeting Proceedings. ESCP Europe: Paris.
- Dobni, CB 2010, 'The Relationship between An Innovation Orientation And Competitive Strategy', *International Journal of Innovation Management*, vol. 14, no. 2, pp. 331-357.
- Gunday, G, Ulusay, G, Kilic, K & Alpakan, L 2011, 'Effects of Innovation Types on Firm Performance', *International Journal of Productions Economics*, vol. 133, no. 2, pp. 662-676.
- Irjayanti, M., & Azis, A. M. (2012). Barrier factors and potential solutions for Indonesian SMEs. *Procedia Economics and Finance*, 4, 3-12
- Perez-Ande Orive (2016). Credit constraints, firms' precautionary investment, and the business cycle. *Journal of Monetary Economics*. North Holland.
- Vithessonthi, Chaiporn, Deflation, Bank Credit Growth, and Non-Performing Loans: Evidence from Japan (March 21, 2016).

International Review of Financial Analysis, Vol 45, 2016, pp. 295-305. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2624275> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2624275>

Yildiz, S, Bastriik, F, & Boz, IK 2014, 'The Effect of Leadership and Innovativeness on Business Performance', *Procedia-Social and Behavioral Science*, vol. 150, no. 2014, pp. 785-793